



Representasi Penerapan Hukum Islam Dalam Kehidupan Perempuan Iran: Analisis Komik Persepolis

**Salma Fitriyani¹, Fauzaan Taufiqurrahman², Sarah Novian³, Yusthalya Nurfitri⁴,
Tenny Sudjatnika⁵**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: salmafityani70@gmail.com

Diterima: 18-12-2025 | Disetujui: 28-1-2025 | Diterbitkan: 30-12-2025

ABSTRACT

This study discusses the representation of Islamic law in the lives of Iranian women through an analysis of Marjane Satrapi's autobiographical comic Persepolis. The background of this study stems from the socio-political changes following the 1979 Islamic Revolution in Iran, which made Islamic law the basis of state policy through the Wilāyat al-Faqīh system. This policy had a significant impact on the regulation of women's bodies, public spaces, and identities, particularly through dress codes, moral control, and social restrictions. This study uses a descriptive qualitative approach with literature study and visual text analysis methods. Persepolis is analyzed as a cultural text using gender theory, Stuart Hall's theory of representation, and contemporary fiqh and maqāṣid al-syarī'ah perspectives. The results show that Persepolis represents the application of Islamic law in Iran more as an instrument of patriarchal political power than as a contextual and welfare-oriented practice of sharia. This comic depicts how women's bodies and lives become objects of state surveillance through the enforcement of the hijab, the segregation of social spaces, and the criminalization of behavior deemed deviant from the state's official morality. These findings reveal a gap between the normative principles of Islamic law, which emphasize justice and human dignity, and the state's repressive legal practices against women. Thus, Persepolis serves as a cultural critique of the rigid application of Islamic law and its insensitivity to gender experiences.

Keywords: contemporary fiqh, Iranian women, Islamic law, Persepolis, representation.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas representasi penerapan hukum Islam dalam kehidupan perempuan Iran melalui analisis komik autobiografis Persepolis karya Marjane Satrapi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perubahan sosial-politik pasca Revolusi Islam Iran 1979 yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar kebijakan negara melalui sistem Wilāyat al-Faqīh. Kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap regulasi tubuh, ruang publik, dan identitas perempuan, khususnya melalui kewajiban berpakaian, kontrol moral, serta pembatasan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis teks visual. Persepolis dianalisis sebagai teks budaya dengan memanfaatkan teori gender, teori representasi Stuart Hall, serta perspektif fiqh kontemporer dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepolis merepresentasikan penerapan hukum Islam di Iran lebih sebagai instrumen kekuasaan politik yang bercorak patriarkal daripada sebagai praktik syariat yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Komik ini menampilkan bagaimana tubuh dan kehidupan perempuan menjadi objek pengawasan negara melalui pemaksaan



hijab, pemisahan ruang sosial, serta kriminalisasi perilaku yang dianggap menyimpang dari moral resmi negara. Temuan ini mengungkap adanya kesenjangan antara prinsip normatif hukum Islam yang menekankan keadilan dan martabat manusia dengan praktik hukum negara yang bersifat represif terhadap perempuan. Dengan demikian, Persepolis berfungsi sebagai kritik kultural terhadap penerapan hukum Islam yang kaku dan tidak sensitif terhadap pengalaman gender.

Kata kunci: fiqh kontemporer, hukum Islam, perempuan Iran, Persepolis, representasi.

Bagaimana Cara Sitosi Artikel ini:

Salma Fitriyani, Fauzaan Taufiqurrahman, Sarah Novian, Yusthalya Nurfitri, & Tenny Sudjatnika. (2025). Representasi Penerapan Hukum Islam Dalam Kehidupan Perempuan Iran: Analisis Komik Persepolis. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(1), 807-817. <https://doi.org/10.63822/88ezzh81>



PENDAHULUAN

Revolusi Islam Iran tahun 1979 menjadi titik balik penting bagi perubahan sosial, politik, dan keagamaan di Iran. Setelah tumbangnya rezim Pahlevi, struktur negara baru dibangun berdasarkan konsep Wilayat al-Faqih, yang menempatkan ulama sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan negara. Sistem ini memiliki akar sejarah panjang sejak era Safawiyah dan mencapai bentuk politik paling kuat dalam Iran modern (Israqi & Hannase, 2025). Konsekuensinya, penafsiran ulama terhadap teks agama memperoleh otoritas dominan, sehingga berdampak langsung pada pengaturan sosial, termasuk aturan mengenai perempuan.

Salah satu perubahan paling signifikan pasca revolusi adalah penerapan kebijakan wajib hijab pada 7 Maret 1979, yang segera diikuti demonstrasi besar kaum perempuan pada 8 Maret 1979. Namun, negara mempertahankan kebijakan tersebut dan menghukum siapa saja yang menolak. Penelitian Wijayanto & Ulinnuha (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pasca revolusi banyak dibentuk oleh penafsiran patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai objek pengawasan negara, mencakup pemisahan ruang sosial, pembatasan mobilitas, pengetatan pakaian, hingga kontrol moral. Situasi ini diperparah oleh terpisahnya Iran dari Eropa dan penguatan fiqh jazari pasca revolusi, yang menjadikan Iran semakin konservatif dalam pendekatan hukum dan sosial (Lagus dkk., 2025).

Dari perspektif pemikiran hukum Islam, perbedaan antara ajaran syariat dan praktik negara sering kali muncul karena tidak semua persoalan kehidupan memiliki nash yang jelas. Karena itu, proses ijtihad diperlukan untuk menjawab persoalan kontemporer. Menurut pemikiran Sayyid Qutb (dalam Muhyidin, 2019), persoalan modern dapat dijawab melalui empat kemungkinan: (1) syariat bersifat qath'i; (2) syariat bersifat dzanni sehingga membutuhkan ijtihad; (3) syariat bersifat umum; atau (4) syariat tidak membahas suatu masalah secara khusus sehingga terbuka bagi ijtihad. Dengan demikian, penerapan hukum Islam seharusnya bersifat kontekstual dan mempertimbangkan kemaslahatan. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan negara Iran pasca revolusi tidak selalu selaras dengan prinsip dinamika fiqh dan maqashid, sehingga menuai kritik dari perspektif gender dan hukum Islam kontemporer.

Dalam memahami pengalaman perempuan Iran, penting membedakan konsep sex dan gender. Sex merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, seperti organ reproduksi dan karakteristik biologis bawaan. Sementara gender adalah konstruksi sosial mengenai peran, perilaku, dan ekspektasi terhadap laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya (Jamil & Dewi, 2023). Gender tidak bersifat alamiah, tetapi dihasilkan melalui proses sosial panjang yang dapat melahirkan subordinasi, marginalisasi, stereotip, dan kontrol terhadap perempuan. Dalam masyarakat patriarkal, konstruksi gender sering dilegitimasi sebagai ajaran agama, padahal lebih banyak dipengaruhi budaya dan politik.

Teori representasi Stuart Hall juga relevan untuk membaca bagaimana perempuan ditampilkan dalam kebijakan dan budaya populer. Menurut Hall, representasi adalah proses produksi makna melalui tanda dan simbol, yang dipahami melalui tiga pendekatan: reflektif, intensional, dan konstruksionis. Representasi tidak netral, melainkan terhubung dengan relasi kuasa yang menentukan bagaimana perempuan diposisikan dan dipersepsikan. Dalam konteks Iran, negara menggunakan simbol-simbol agama untuk membentuk citra perempuan ideal, sementara perempuan sendiri menegosiasi atau bahkan menolak konstruksi tersebut.

Dalam lanskap sosial dan politik yang kompleks ini, komik autobiografis Persepolis karya Marjane Satrapi menjadi teks budaya penting. Melalui narasi visual hitam-putih, Satrapi menggambarkan bagaimana perempuan mengalami tekanan sosial dan politik pasca revolusi, mulai dari kewajiban berbusana tertentu, pemisahan ruang publik, kontrol moral negara, hingga pendidikan yang sarat ideologi. Representasi dalam Persepolis menunjukkan bagaimana hukum Islam tidak hanya diperlakukan sebagai



norma keagamaan, tetapi juga sebagai alat politik untuk membentuk identitas dan perilaku warga negara, khususnya perempuan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi penerapan hukum Islam terhadap perempuan Iran dalam komik Persepolis dengan menggunakan teori gender, teori representasi, dan kajian fiqh kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai relasi antara kekuasaan agama, konstruksi gender, dan pengalaman perempuan dalam konteks negara Islam modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali representasi penerapan hukum Islam melalui analisis komik Persepolis. Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama: bahan pustaka dan analisis visual komik. Bahan pustaka meliputi literatur keislaman kontemporer (fiqh kontemporer, maqashid al-syari‘ah) dan teori gender/representasi, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan mendalam. Analisis visual dilakukan dengan membaca detail panel-panel Persepolis secara sistematis, menelaah gambar, teks, simbol, dan konteks narasi sesuai pendekatan semiotika serta model representasi Stuart Hall (reflektif, intensional, konstruksionis) (Hall, 1997). Teknik analisis mengikuti model analisis isi kualitatif, yaitu memfokuskan pada makna tersurat dan tersirat (denotatif/konotatif) dalam visualisasi dan dialog komik (Hombing et al., 2025). Studi pustaka mendukung interpretasi visual dengan meninjau literatur mengenai konstruksi sosial peran perempuan (Fakih, 1996) serta kerangka normative fiqh (keadilan, maqashid, ijtihad) dalam Islam kontemporer (Umam, 2001; Ghazali et al., 2009). Dengan demikian, metode penelitian ini melibatkan: (1) Dokumentasi dan studi literatur, mengumpulkan naskah hukum Islam dan literatur gender/representasi sebagai konteks teoritis; (2) Analisis panel komik, menyeleksi dan menginterpretasikan panel-panel kunci Persepolis yang menggambarkan konflik gender dan pemakaian hijab; serta (3) Sintesis komparatif, membandingkan temuan representasi visual dengan prinsip fiqh normatif (keadilan, maqashid, ijtihad) dan praktik hukum Islam di Iran pasca-1979 (wilayah al-faqih, pengawasan moral) (Ardana et al., 2020; Hombing et al., 2025). Proses analisis bersifat iteratif: observasi visual dipadukan dengan kajian pustaka, sehingga setiap temuan dikonfrontasi dengan kerangka teori gender, representasi, dan maqashid al-syari‘ah untuk menghasilkan pemahaman kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini diperoleh dari komik Persepolis karya Marjane Satrapi (2002), yang merepresentasikan tiga tema utama penerapan aturan pakaian, pembatasan ruang publik, dan kontrol negara atas identitas perempuan. Tema-tema ini menunjukkan bagaimana pengalaman pribadi penulis yang merupakan perempuan Iran mengalami diskriminasi gender di negaranya sendiri.

Sinopsis Komik Persepolis

Berdasarkan website Study.com, Starmack menyebutkan bahwa Persepolis adalah autobiografi grafis karya Marjane Satrapi yang awalnya diterbitkan dalam empat volume antara tahun 2000 dan 2003. Karya ini menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang anak yang tumbuh di lingkungan rumah tangga Muslim yang religius di negara yang sarat dengan kekacauan politik dan sosial. Sejarah dan budaya Iran



sangat terkait erat dengan kisah hidup penulis, meskipun pengalamannya tinggal di Eropa juga berkontribusi secara signifikan terhadap penemuan jati dirinya.

Buku ini dibuka dengan Marjane yang berusia 10 tahun, memperlihatkan sekilas kehidupannya sebagai gadis kecil berhijab yang bersekolah di sekolah agama khusus perempuan. Penulis menggunakan sudut pandangnya sebagai seorang anak untuk menggambarkan sejarah Iran dan bagaimana revolusi itu berlangsung. Kekerasan ada di mana-mana, dengan anggota keluarga dan dirinya sendiri berada di bawah ancaman langsung. Sementara Marji mencoba menikmati hidup sebagai remaja, orang tuanya semakin khawatir dengan hobi-hobi yang tidak konvensional dan sifat pemberontaknya.

Marji kemudian dikirim ke Austria, tempat ia berpindah-pindah tempat tinggal, berjuang untuk menyesuaikan diri di masyarakat Eropa yang didominasi oleh nilai-nilai liberal. Sebagai seorang wanita muda, ia mulai mengeksplorasi seksualitasnya dan terlibat dalam penggunaan narkoba. Hidupnya berubah menjadi spiral kejatuhan, dan ia berakhir menjadi tunawisma dan sakit. Setelah kembali menjalin kontak dengan orang tuanya, Marji menemukan jalan kembali pulang ke Iran.

Marjane terus berjuang meskipun sudah kembali ke tanah air. Penyesuaian diri dengan rezim baru menjadi tantangan, dan ia merasa asing di tanah kelahirannya. Ia mencoba bunuh diri karena putus asa tetapi berhasil selamat. Ketika ia pulih, Marji memutuskan untuk mengubah hidupnya dengan mengubah penampilan dan pola pikirnya. Ia menemukan pekerjaan baru dan juga mengejar karir di bidang seni. Ia juga sempat menikah, tetapi hubungan itu tidak bertahan lama. Setelah perceraian, Marji kembali berangkat ke Austria dan memulai kehidupan baru sebagai seorang seniman.

Autobiografi ini berkisar pada beberapa tema, termasuk revolusi politik dan transformasi budaya Iran, perang negara tersebut dengan Irak, proses pendewasaan dan penemuan identitas diri, serta kehidupan di negeri asing. Tak terkecuali tema diskriminasi gender yang kemudian dijadikan objek dalam mini riset ini. Elemen visual dalam buku ini juga membantu menggambarkan peristiwa-peristiwa yang memilukan dalam cerita. Sejak diterbitkan, Persepolis karya Marjane Satrapi telah mendapatkan dukungan yang luar biasa dan diadaptasi menjadi sebuah film, yang kemudian meraih nominasi Academy Award.

Representasi Penerapan Hukum Islam Dalam Persepolis

1. Penerapan Aturan Pakaian

Komik Persepolis menggambarkan penerapan aturan pakaian sebagai salah satu kebijakan paling awal dan paling nyata pasca revolusi Iran. Kewajiban mengenakan hijab atau jilbab diperkenalkan sejak usia dini, bahkan di lingkungan pendidikan. Satrapi menuliskan, "Then came 1980: The year it became obligatory to wear veil at school" (Satrapi, 2002: 4). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan berpakaian tidak hanya berlaku di ruang publik, tetapi juga diberlakukan di lingkungan sekolah.

Penerapan aturan tersebut juga ternyata berdampak langsung terhadap hubungan sosial anak-anak perempuan. Dalam komiknya, Satrapi menyatakan, "We found ourselves veiled and separated from our friends" (Satrapi, 2002: 4), yang menandakan bahwa pemakaian hijab ini bukan hanya sekedar pakaian, namun juga simbol dari pembatasan hubungan sosial. Aturan berpakaian ini kemudian semakin diperketat dan dikaitkan dengan moralitas serta keamanan perempuan Iran. Pemerintah Iran memberikan narasi bahwa rambut perempuan dapat membangkitkan hasrat laki-laki, sebagaimana dinyatakan oleh Satrapi, "Women's hair emanates rays that excite men. That's why women should cover their hair!" (Satrapi, 2002: 74).



Selain itu, aturan kewajiban berhijab juga dihubungkan dengan ancaman kekerasan. Satrapi menggambarkan pengalaman kekerasan dan pelecehan verbal yang dialami oleh ibunya di ruang publik, "They said that woman like me should be pushed up against a wall and fucked. And that if I don't want that to happen, I should wear the veil." (Satrapi, 2002: 74). Pernyataan ini menunjukkan bagaimana aturan pakaian diresmikan sebagai perlindungan, sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan negara, "And so to protect women from all the potential rapists, they decreed that wearing the veil was obligatory." (Satrapi, 2002: 74)

Selain daripada aturan berhijab, pemerintah juga mengatur detail lain dalam penampilan perempuan, seperti larangan memakai perhiasan, jeans, dan cat kuku, yang telah digambarkan oleh Satrapi, "You'd be better off without nail polish, you could get arrested." (Satrapi, 2002: 119) dan "I've told you a hundred times that it is strictly forbidden to wear jewelry and jeans." (Satrapi, 2002: 143). Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan menjadi objek aturan negara secara ketat.

2. Pembatasan Ruang Publik Perempuan

Dalam Persepolis, pembatasan perempuan tidak hanya ditampilkan melalui kebijakan negara secara langsung, tetapi juga melalui struktur sosial yang membatasi relasi dan mobilitas perempuan berdasarkan kelas sosial. Hal ini digambarkan oleh Satrapi melalui kisah Mehri, pembantu di rumahnya yang menjalin hubungan dengan seorang pemuda dari kelas sosial yang lebih tinggi. Ketika hubungan mereka terungkap, ayah Satrapi menegaskan, "In this country, you must stay within your own social class." (Satrapi, 2002: 37). Kutipan ini merujuk pada norma sosial yang membatasi relasi antar kelas, khususnya bagi perempuan dari kelas bawah. Upaya Mehri untuk menyamar sebagai saudari Satrapi menunjukkan keterbatasan ruang sosial yang ia miliki serta strategi perempuan kelas bawah menegosiasikan batasan tersebut.

Selain itu, pembatasan ruang publik perempuan juga tampak dalam stigma sosial terhadap perempuan yang tidak memenuhi norma moral negara. Satrapi menggambarkan dalam komiknya, "You know what is is like to be an unmarried mother in this country. You will be shunned, life will be hell." (Satrapi, 2002: 58). Pernyataan ini menunjukkan bahwa perempuan yang menyimpang dari standar moral akan mengalami pengucilan sosial.

3. Kontrol Negara atas Identitas Perempuan

Komik Persepolis juga menggambarkan bagaimana pemerintah secara aktif mengontrol identitas perempuan melalui kebijakan represif. Penindasan terhadap pihak yang dianggap rezim digambarkan secara langsung, "Those who opposed the regime were systematically arrested." (Satrapi, 2002: 117). Selain itu, Satrapi juga mencatat keberadaan "Guardians of the revolution", "They were guardians of the revolution, the women's branch. This group has been added in 1982, to arrest women who were improperly veiled." (Satrapi, 2002: 132). Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur, namun juga mengawasi dan menghukum para perempuan yang dianggap melanggar norma berpakaian.

Kontrol identitas juga muncul dalam tekanan sosial. Perempuan yang dianggap tidak bermoral seringkali dikucilkan, seperti yang diungkapkan oleh Satrapi dalam komentar masyarakat tentang perempuan lain, "My neighbor said she heard that their women are prostituting themselves. No dignity at all!" (Satrapi, 2002: 93). Selain itu, ketakutan terhadap terhadap hukuman negara terlihat dalam pengalaman ibu Satrapi setelah fotonya dipublikasikan di media Eropa, "My mother was really scared", yang



menunjukkan bagaimana pengawasan negara menciptakan rasa takut, bahkan dalam tindakan yang bersifat personal.

Pembahasan

Analisis Hukum Fiqh Vs Praktik Hukum Islam Di Iran

Analisis dimulai dengan kerangka fiqh normatif yang menekankan keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan umat (maqashid al-syari‘ah). Menurut literatur klasik, tujuan syariat Islam adalah kemaslahatan dunia-akhirat umat manusia, diwarnai prinsip keadilan, kasih sayang, dan hikmah (Umam, 2001). Ibnu Qayyim al-Jawziyya menyatakan bahwa “tujuan syari‘at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Semua ketentuan syariat adalah keadilan yang mengandung kasih sayang dan hikmah”. Konsep ini menegaskan bahwa apapun kebijakan yang tidak mencerminkan keadilan dan kebijakan sejatinya berada di luar tujuan Syariah. Dalam konteks ijihad, al-Syatibi menegaskan bahwa pemahaman utuh terhadap maqashid al-syariah adalah syarat mutlak bagi seorang mujahid (Ghazali et al., 2009). Dengan kata lain, pengembangan hukum Islam harus berpijak pada maqashid (seperti melindungi kehidupan, akal, keturunan, agama, harta) agar hukum yang dihasilkan tidak menjadi beban melainkan menegakkan keadilan universal.

Kontras dengan prinsip tersebut, praktik pemerintahan Islam di Iran pasca-revolusi 1979 memperlihatkan penyimpangan signifikan. Republik Islam Iran mendasarkan sistem pemerintahannya pada Wilayat al-Faqih, di mana kekuasaan tertinggi secara de facto dipegang oleh ulama (Wali Faqih) yang berperan sebagai wakil Tuhan (Wijayanto & Ulinnuha, 2022). Konstitusi Iran secara eksplisit mengangkat Ayatollah Khomeini sebagai Wali Faqih pertama (pasal 107). Sistem ini menekankan dominasi otoritas ulama laki-laki dalam semua aspek sosial-politik. Peneliti sebelumnya mencatat bahwa dominasi ini “menyebabkan interpretasi sepihak teks keagamaan, termasuk mengenai peran perempuan, serta mengakumulasi kekuasaan di tangan ulama laki-laki”. Akibatnya, kebijakan pasca perubahan rezim sering bersifat koersif, mengakar pada budaya patriarki, dan diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya, penerapan wajib hijab sejak Maret 1979 dilakukan secara represif tanpa toleransi, disertai ancaman hukum dan penindasan (HRW, 2024). Kebijakan-kebijakan baru bahkan memperkuat “kendali pemerintah atas kehidupan perempuan” melalui undang-undang “Penguatan Hijab dan Kesopanan” yang mengancam sanksi berat bagi pelanggar (Human Rights Watch, 2024). Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan gender fiqh normatif; hukum menjadi instrumen politik rezim, bukan manifestasi maqāṣid universal (Cipto, 2004).

Secara keseluruhan, Persepolis menangkap benturan norma normatif-versus-praktik ini melalui panel-panel yang kuat. Sebagai contoh, Satrapi menggambarkan adegan Marjane yang berjalan mengenakan hijab dengan celana jeans dan jaket denim, simbol subkultur Barat. Ia ditahan oleh Pasukan Moral Perempuan yang mewakili aparat negara, lalu diancam, “Mereka tak perlu memberitahu orangtuamu. Aku bisa dicambuk. Pokoknya apa saja bisa terjadi padamu” (Satrapi, 2007, hlm. 134). Kalimat ancaman ini memperlihatkan bagaimana negara memberlakukan pemaksaan hukum syar‘i secara keras: kebebasan individu perempuan terancam karena pelanggaran kode pakaian yang didefinisikan rezim. Panel ini memvisualisasikan konsep pengawasan moral negara atas tubuh dan identitas perempuan. Menurut Hall (1997), gambar-gambar semacam ini menegaskan bahwa makna (penampilan perempuan) tidak objektif melainkan dibingkai ulang oleh wacana kekuasaan; Satrapi meretas kodifikasi visual ini untuk memperlihatkan kehendak otoriter di balik hijab wajib.



Selain adegan tersebut, Persepolis juga menggambarkan resistensi perempuan terhadap kontrol rezim. Misalnya, panel-panel yang menampilkan Marjane dan teman-temannya bersepeda tanpa hijab

(pada periode pra-harus) atau protes feminis saat revolusi menandakan perlawanan terhadap kewajiban religius yang dipolitikkan. Lukisan ekspresif Satrapi yang berwarna hitam putih sederhana mempertegas suasana tegang dan keputusasaan. Terlebih lagi, pendekatan representasi secara konstruksionis (Hall, 1997) terlihat saat visual Persepolis memotivasi pembaca merekonstruksi makna hijab bukan sebagai kodrat alamiah, melainkan hasil kebijakan ideologis. Satrapi, lewat gambarannya, menunjukkan bahwa penafsiran agama oleh otoritas negara menyempitkan maqashid hukum Islam, sehingga hak-hak perempuan (seperti kebebasan berpakaian dan berpendapat) terkikis.

Dengan demikian, analisis panel komik Persepolis meneguhkan temuan bahwa praktik hukum di Iran pasca-1979 sering menyimpang dari semangat fiqh normatif: alih-alih menegakkan keadilan dan manfaat bersama (maqāṣid), aturan negara lebih menekankan kontrol keagamaan-politik. Komik ini merepresentasikan konflik tersebut secara visual melalui simbol-simbol kekerasan moral, pemaksaan busana, dan ketegangan gender yang digambarkan Satrapi. Lewat karya ini, Satrapi menegaskan bahwa penafsiran Islam perlu mempertimbangkan kontekstualisasi maqashid dan ijtihad kontemporer demi keadilan sejati bagi perempuan Iran (Fakih, 1996; Hall, 1997).

Dampak Penerapan Hukum Islam Terhadap Perempuan Iran

Penerapan Hukum Islam (Syariah) setelah Revolusi Islam pada tahun 1979 mengubah secara drastis kehidupan perempuan di Iran. Perubahan ini sering kali dipicu oleh dominasi penafsiran patriarkal dalam teks agama yang melegitimasi kontrol terhadap perempuan (Rohmana, 2016). Komik Persepolis secara gamblang menggambarkan dampak ini, yang mencakup pembatasan sosial, hukum, dan kebebasan individu.

1. Pembatasan pada Ranah Publik dan Pakaian (Jilbab Wajib)

Dampak yang paling terlihat dan segera dirasakan adalah penindasan terhadap kebebasan berpakaian dan kehadiran di ruang publik. Jilbab tidak lagi menjadi pilihan religius, melainkan alat kontrol politik dan sosial guna membentuk identitas tunggal bagi perempuan. Secara sosiologis, hal ini merepresentasikan upaya otoritas keagamaan dalam melakukan kontrol sosial yang ketat terhadap tubuh perempuan (Sari, 2023). Pemberlakuan Jilbab: Komik ini menyoroti momen wajibnya pemakaian jilbab (cadar/kerudung), yang digambarkan sebagai simbol hilangnya kebebasan.

- Representasi: Marjane dan teman-temannya awalnya menolak kewajiban ini, menunjukkan resistensi awal terhadap peraturan baru. Jilbab tidak lagi menjadi pilihan religius, melainkan alat kontrol politik dan sosial.
- Pengawasan Moral: Pembentukan Komite Revolusi yang bertugas mengawasi tingkah laku masyarakat, khususnya perempuan.
- Dampak: Rasa takut dan ancaman hukuman jika berpakaian "tidak Islami" atau melakukan kontak dengan lawan jenis di tempat umum, menciptakan lingkungan yang penuh kecemasan dan pengekangan.

2. Diskriminasi dalam Sistem Hukum (Gender Apartheid)



Perubahan hukum pasca-revolusi mendiskriminasikan perempuan dan merampas hak-hak yang sebelumnya telah diperoleh. Dalam struktur hukum Islam yang diterapkan secara kaku, perempuan sering kali diposisikan dalam posisi subordinat di bawah otoritas laki-laki (Hidayati, 2015).

- Hak Keluarga dan Perceraian: Hukum mengenai keluarga, warisan, dan perceraian diubah untuk memposisikan perempuan di bawah otoritas laki-laki.
- Contoh: Perempuan memiliki hak yang jauh lebih kecil dalam hal perceraian dan hak asuh anak.

3. Nilai Kesaksian dan Diyya (Uang Darah)

Dalam hukum Iran, nilai kesaksian seorang perempuan seringkali setengah dari nilai kesaksian laki-laki, dan hal yang sama berlaku untuk uang darah.

- Dampak: Secara legal, nilai kemanusiaan seorang perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, sebuah bentuk institionalisasi diskriminasi.
- Pembatasan Akses Pendidikan dan Profesional: Meskipun Marjane Satrapi menunjukkan bahwa banyak perempuan Iran tetap berpendidikan tinggi dan berjuang untuk karier, komik ini juga menyinggung upaya pembatasan.
- Pemisahan Gender: Sekolah dan universitas dipisahkan berdasarkan gender, dan kurikulum disaring untuk menghilangkan elemen-elemen "Barat" atau "tidak Islami".
- Pengecualian Bidang Studi: Pada periode tertentu, beberapa bidang studi penting seperti teknik dan pertanian dibatasi atau dilarang sama sekali bagi perempuan, membatasi pilihan karier mereka.

4. Resistensi dan Kehidupan Ganda

Persepolis merekam kuatnya semangat resistensi perempuan Iran yang melakukan pemberontakan sehari-hari. Perempuan sering kali menjalani kehidupan ganda: patuh di depan umum namun bebas di ranah privat. Fenomena ini merupakan bentuk negosiasi identitas perempuan dalam menghadapi tekanan struktur sosial yang represif (Puspitasari, 2022). Secara keseluruhan, karya ini menunjukkan bahwa ketika implementasi hukum Islam kehilangan dimensi kemanusiaan dan ijihad kontemporer, hukum tersebut justru menjadi instrumen marginalisasi terhadap perempuan.

- Kontras Publik dan Privat: Perempuan di komik sering kali menjalani kehidupan ganda: patuh di depan umum (memakai jilbab, berpakaian sopan) tetapi bebas di ranah privat (mendengarkan musik Barat, mengadakan pesta, memakai pakaian modern).
- Representasi: Momen ketika ibu Marjane menjahit tirai jendela agar mereka dapat mengadakan pesta tanpa terlihat oleh tetangga adalah simbol kehidupan rahasia ini.
- Perjuangan Identitas: Marjane Satrapi sendiri menjadi contoh dari perjuangan perempuan untuk mempertahankan identitas individual mereka di bawah rezim yang berupaya menyeragamkannya. Tindakan-tindakan kecil seperti menyelundupkan poster punk Barat atau menolak diinterogasi Komite Revolusi adalah bentuk pemberontakan harian.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap komik Persepolis karya Marjane Satrapi, dapat disimpulkan bahwa Revolusi Islam Iran tahun 1979 telah mengubah struktur negara menjadi sistem Wilayah al-Faqih yang menempatkan penafsiran ulama sebagai otoritas tertinggi dalam kebijakan sosial dan hukum. Hal ini berdampak pada diterapkannya kebijakan yang menempatkan perempuan sebagai objek pengawasan negara, mulai dari kewajiban berhijab sejak usia dini hingga pembatasan ketat di ruang publik yang direpresentasikan Satrapi sebagai alat kontrol politik dan identitas. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang seharusnya menjunjung keadilan dan kemaslahatan dengan praktik hukum di Iran yang cenderung bersifat patriarkal dan represif.

Dampak dari penerapan hukum ini menciptakan diskriminasi sistemik dalam sistem keluarga, pendidikan, dan nilai kesaksian hukum yang memposisikan perempuan di bawah otoritas laki-laki. Meskipun demikian, komik Persepolis juga merekam kuatnya semangat resistensi perempuan Iran yang melakukan pemberontakan sehari-hari dan menjalani kehidupan ganda sebagai bentuk negosiasi terhadap tekanan rezim. Secara keseluruhan, karya ini menunjukkan bahwa ketika ijihad kontemporer diabaikan demi penafsiran kaku, hukum Islam kehilangan dimensi kemanusiaannya dan justru menjadi instrumen marginalisasi terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, D., Lukitasari, E. H., & Anwar, A. K. (2020). Analisis makna visual karakter dari komik Kumpulan kisah para nabi. Universitas Sahid Surakarta.
- Cipto, B. (2004). Dinamika politik Iran: Puritanisme ulama, proses demokratisasi, dan fenomena Khatami. Pustaka Pelajar.
- Duncan, J. (2015). Beyond the veil: Graphic representation of Islamic women. *Compass: Journal of Islamic Education*, April 2015.
- Fakih, M. (1996). Analisis gender & transformasi sosial. Pustaka Pelajar.
- Ghazali, A. M., et al. (2009). Metodologi studi al-Qur'an. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hall, S. (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices. Sage Publications.
- Hidayati, N. (2015). Representasi perempuan dalam struktur hukum Islam. *Musawa: Jurnal Pemikiran Hukum dan Keadilan*, 7(2), 155–174.
- Hombing, R. A. B., Arifa, Z., & Sinaga, K. A. J.* (2025). Analisis konten komik sebagai sarana kritik sosial dan literasi digital dalam @majalah,tempo. *Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)*, 10(2), 674–681.
- Human Rights Watch. (2024, October 14). Iran: New hijab law adds restrictions and punishments. [\[https://www.hrw.org/news/2024/10/14/iran-new-hijab-law-adds-restrictions-and-punishments\]](https://www.hrw.org/news/2024/10/14/iran-new-hijab-law-adds-restrictions-and-punishments)
- Israqi, M. I., & Hannase, M. (2025). Evolusi Wilayah al-Faqih: Dari akar sejarah Safawiyah hingga dominasi politik Iran modern. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 2513–2533.
- Jamil, M., & Dewi, R. S. (2023). Seks, gender, dan representasi. *Jurnal Scientia Indonesia*, 1(1).
- Lagus, W., & Hidayat, R. (2025). Pembaharuan hukum keluarga Islam di Iran: Reformasi pasca-revolusi 1979 dalam perspektif mazhab Ja'fari. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 89–103.
- Muhyidin, M. (2019). *Maqashid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai pondasi dasar pengembangan hukum. *Gema Keadilan*, 6(1), 13–32.



- Puspitasari, I. (2022). Konstruksi identitas perempuan dalam sastra autobiografi: Studi atas memoar perempuan Timur Tengah. *Jurnal Sastra Kontemporer*, 10(3), 88–102.
- Rohmana, J. A. (2016). Memahami penafsiran patriarkal dalam teks agama: Sebuah tinjauan kritis. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 11(2), 130–145.
- Sari, D. P. (2023). Kritik atas otoritas keagamaan dan kontrol sosial terhadap tubuh perempuan. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 22–40.
- Satrapi, M. (2002). *Persepolis: The story of a childhood*. Jonathan Cape.
- Satrapi, M. (2007). *The complete Persepolis: The story of a childhood*. Pantheon Books.
- Starmack, S. (n.d.). *Persepolis by Marjane Satrapi: Summary, characters & analysis*. Study.com. [\[https://study.com/learn/lesson/video/persepolis-marjane-satrapi-book-summary-themes-analysis.html\]](https://study.com/learn/lesson/video/persepolis-marjane-satrapi-book-summary-themes-analysis.html) [\[https://study.com/learn/lesson/video/persepolis-marjane-satrapi-book-summary-themes-analysis.html\]](https://study.com/learn/lesson/video/persepolis-marjane-satrapi-book-summary-themes-analysis.html)
- Umam, K. (2001). *Ushul Fiqih* (hlm. 127). Pustaka Setia.
- Wijayanto, N. W., & Ulinnuha, R. (2022). Resistensi perempuan Iran terhadap kebijakan wajib berhijab pada era Hassan Rouhani. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 21(2), 171–186.